

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak Krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan, yang baik, atau lebih dikenal dengan nama *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Dikarenakan buruknya tata kelola pemerintah dan perusahaan yang ada di Indonesia pada masa itu yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Contohnya seperti sistem regulasi yang kurang mendukung, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, dan praktik perbankan yang melemah. Semenjak itu, semua pihak sepakat untuk bangkit dari keterpurukan yang dimulai dengan tata kelola yang dilakukan pemerintah, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta (Zakarsyi,2006). Berbagai upaya akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Salah satu faktor penyumbang krisis ekonomi tahun 1997 adalah lemahnya pengawasan internal dan belum diterimanya praktik *Good Corporate Governance* (GCG), oleh karena itu para ahli menyarankan bahwa setiap perusahaan di Indonesia harus memiliki badan yang disebut Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang akan mengawasi manajemen dalam melaksanakan tugas wewenangnya sebagai pengelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang

mendukung unsur keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).

Cadbury (dalam Bhuiyan dan Biswas, 2007) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan terbuka (*transparency*), maka akan menambah nilai (*value*) bagi semua *stakeholder*. Sebaliknya, tanpa adanya pengungkapan *corporate governance* yang jelas, para *stakeholder* tidak dapat mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka.

*Corporate governance* adalah suatu konsep tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan menjamin pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perhatian terhadap isu *corporate governance* secara internasional dipicu oleh berbagai skandal spektakuler seperti Enron, Worldcom, Tyco, dan lain-lain. *Corporate governance* sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru atau inovasi, tetapi kewaspadaan publik terhadap pentingnya *good corporate governance* baru terbentuk beberapa tahun terakhir (Kusumawati, 2007).

*Good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengukur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

Konsep ini menekankan pada dua hal yaitu, (1) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, dan (2) kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Kaihatu, 2006).

Laporan tahunan merupakan perangkat utama untuk menyampaikan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada pihak-pihak diluar perusahaan yang mempunyai kepentingan diperusahaan tersebut. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditur dan pengguna informasi lainnya. Kualitas informasi dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan Murtanto dan Elvina(2005), merupakan media yang digunakan oleh perusahaan *go public* untuk mengomukasikan informasi kepada pihak luar manajemen. Pihak luar manajemen yang berkepentingan seperti kreditor, investor, masyarakat, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya. Menurut Zakarsyi (2006), kualitas informasi dapat dilihat dari pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya Zakarsyi, (2006) dalam Putranto (2013):

1. Laporan keuangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan buku

sebelumnya, laporan laba rugi dari buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan tersebut.

2. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha.
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku lampau.
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menguji kembali variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing Perusahaan, kepemilikan dispersi, Profitabilitas, Ukuran Dewan komisaris, dan Lverage Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Rianto Jati Putranto dan Surya Raharjo (2013). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah perubahan dari perusahaan perbankan menjadi perusahaan manufaktur kemudian perubahan tahun pengamatan dari tahun 2008-2011 menjadi 2009-2012 dan penambahan variabel dari lima variabel menjadi enam variabel dengan pergantian

variabel kualitas audit menjadi *leverage* dan penambahan variabel umur listing sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini ukuran Perusahaan, Umur Listing Perusahaan, Kepemilikan Dispersi, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan *Leverage*.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasar latar belakang diatas maka penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate governance* dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
2. Apakah umur listing perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
3. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
6. Apakah leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengujipengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Untuk mengujipengaruh umur listing perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
6. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
2. Bagi calon investor, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.

3. Bagi calon kreditur, sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan pemberian kredit pada perusahaan.
4. Bagi peneliti berikutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance*.